

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program/Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Rencana kerja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2018 yang berpedoman pada RPJMD 2014-2018. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting bagi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang terstruktur akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pemungutan Liar
14. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018;
19. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2018.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memasukkan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

- II.1. Evaluasi Hasil Renja OPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

- III.1. Rencana program dan kegiatan dalam perubahan renja OPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL RENJA OPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2017

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu dan capaian Renstra OPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun lalu (tahun 2016), evaluasi capaian kinerja tahun 2017 bulan Januari sampai Mei 2017.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2014-2018 terdiri dari 14 program dan 49 kegiatan, yang terevaluasi sampai dengan tahun 2016 terdiri dari 4 program dan 24 kegiatan karena terdapat 1 program dan 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 dan direncanakan dilakukan pada tahun 2017. Evaluasi kinerja pelaksanaan renja dilakukan dengan membandingkan hasil perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun 2016 dengan target capaian kinerja Renstra tahun 2018. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat capaian realisasi target renstra pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata-rata 42%, hal ini disebabkan evaluasi dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017. Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel I sebagai berikut :

TABEL I
EVALUASI HASIL RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 LEMBAR : 1 dari 4

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018 (Tahun akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (2014-2016)	Target Kinerja Renja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2017		
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)*	10=(9/4)*	
2.12.01	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
2.12.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya layanan jasa surat menyurat	Bulan	60	24	12	5	42%	29	48%
2.12.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya layanan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Bulan	60	24	12	5	42%	29	48%
2.12.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	Unit	125	44	48	-	0%	44	35%
2.12.01.05	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Asuransi Kendaraan Dinas	Unit	5	4	2	-	0%	4	80%
2.12.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Unit	20	6	12	-	0%	6	30%
2.12.01.07	Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya layanan jasa Adm Keuangan.	bulan	60	24	12	5	42%	29	48%
2.12.01.08	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Buah	60	24	12	5	42%	29	48%
2.12.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik	%	100	-	100	-	0%	-	0%
2.12.01.14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga layak pakai	%	100	-	100	-	0%	-	0%
2.12.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua informasi yang diperoleh selalu up to date	%	100	-	100	-	0%	-	0%

LEMBAR : 2 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)*	10=(9/4)*	
2.12.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah	Bulan	60	24	12	5	42%	29	48%
2.12.01.19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah	Bulan	60	24	12	-	0%	24	40%
2.12.01.20	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran	Bulan	60	24	12	5	42%	29	48%
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur								
2.12.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional.	unit	1	1	-	-	-	1	100%
2.12.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	30	10	2	-	-	10	33%
2.12.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	unit	25	10	-	-	-	10	40%
2.12.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor/Dinas	kegiatan	10	4	-	-	-	4	40%
2.12.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	Unit	25	7	12	1	8%	8	32%
2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur								
2.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	-	kegiatan	5	3	-	-	-	3	60%
2.12.06	Program Peningkatan Pengemb Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem pelaporan yang lebih baik								
2.12.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ihktisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja ihktisar realisasi kinerja	dok	25	10	5	1	20%	11	44%
2.12.06.01	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	dok	5	1	1	-	-	1	15%
2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	dok	5	-	1	-	-	-	0%
2.12.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terwujudnya pengembangan sistem informasi publik								
2.12.23.01	Kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Terwujudnya pengembangan sistem informasi publik	Unit	10	2	-	-	-	2	20%

LEMBAR : 3 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)*	10=(9/4)*	
1.20.14.28	Program peningkatan pelayanan perizinan	Terpenuhinya layanan perizinan								
	Penyediaan jasa pelayanan di bidang perizinan	Peningkatan Pelayanan perizinan	Bulan	60	24	-	-	-	24	40%
	Fasilitas pengaduan masyarakat	Tersedianya Fasilitasi Pengaduan	Triwulan	20	8	-	-	-	8	40%
	Kajian/analisa indeks kepuasan masyarakat dan laporan perizinan	Tersedianya IKM dan Laporan perizinan	Bulan	60	24	-	-	-	24	40%
	Sosialisasi pelayanan perizinan	Terlaksananya Sosialisasi terhadap publik	Kecamatan	44	12	-	-	-	12	27%
	Penyusunan standar pelayanan ,standar pelayanan minimal ,maklumat pelayanan dan protap	Tersedianya penyusunan SP, SOP, Protap dan Maklumat Pelayanan	Tahun	4	1	-	-	-	1	25%
2.12.15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi									
2.12.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	terwujudnya potensi unggulan daerah	bulan			12	5	42%	5	#DIV/0!
2.12.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	terlaksananya koordinasi dan konsultasi PM	bulan			12	5	42%	5	#DIV/0!
2.12.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	tersedianya SDM yang berkualitas	keg			1	-	0%	-	#DIV/0!
2.12.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	terwujudnya pameran promosi	keg			3	-	0%	-	#DIV/0!
2.12.16	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi									
2.12.16.04	Pengembangan system informasi penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi penanaman modal	bulan			12	5	42%	5	#DIV/0!
2.12.16.10	Pembinaan Badan Usaha Daerah (BUD)		bulan			12	5	42%	5	#DIV/0!
2.12.16.11	Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	bulan			12	5	42%	5	#DIV/0!
2.12.28	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan									
2.12.28.01	Penyediaan jasa pelayanan	Terpenuhinya layanan perizinan	izin		-	3.600	1.189	33%	1.189	#DIV/0!
2.12.28.02	Pengolahan data pelayanan perizinan	Terciptanya tertib administrasi perizinan	izin		-	3.600	1.189	33%	1.189	#DIV/0!

LEMBAR : 4 dari 4

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)*	10=(9/4)*
2.12.29	Program optimalisasi pelayanan perizinan								
2.12.29.02	Kajian/analisa penyusunan kebijakan pelayanan perizinan	Tersedianya peraturan internal, mekanisme, pakta integritas, SOP, SP, dan SPM	%		100	100	1	100	#DIV/0!
2.12.29.03	Monitoring, evaluasi dan laporan	Terciptanya zero complain governance	bulan		12	5	0	5	#DIV/0!

Pangkajene Sidenreng, 18 Mei 2017
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. H. SYAHRUDDIN HT.Ed.M
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19580201 198303 1 020

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

III.1. Program dan Kegiatan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 memuat 10 Program dan 36 Kegiatan dengan kelompok sasaran yakni masyarakat dan petugas penyelenggara/pelaksana perizinan yang bergerak di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada perkiraan maju rencana tahun 2018 memuat 9 program dan 38 kegiatan.

Total kebutuhan dana/pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.405.245.000,-

Adapun rincian program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- 6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- 12) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 13) Pelayanan administrasi perkantoran

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan :

- 14) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 15) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 16) Pengadaan Mebeleur
- 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- 19) Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan :

- 20) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- 21) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 22) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Kegiatan :

- 23) Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

- 24) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 25) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
 - 26) Penyelenggaraan Pameran Investasi
6. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
- Kegiatan :
- 27) Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
 - 28) Pembinaan Badan Usaha Daerah (BUD)
 - 29) Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 30) Penyusunan RUPMK
 - 31) Penyusunan Provil Investasi
 - 32) Sosialisasi Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal
7. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
- 33) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
8. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
- Kegiatan :
- 34) Penyediaan Jasa Pelayanan
 - 35) Peningkatan Efisiensi Pelayanan Perizinan
 - 36) Pengolahan Data Pelayanan Perizinan
 - 37) Sosialisasi Pelayanan Perizinan

9. PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIZINAN

Kegiatan :

38)Kajian/ Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan

39)Monitoring, Evaluasi dan Laporan

Adapun rumusan rancangan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2017 dan perkiraan maju tahun 2018 dapat dilihat pada tabel III.1 (terlampir)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra tahun 2014-2018, mengingat tahun ini merupakan tahun kedua RPJMD tahap ketiga dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2017.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada penyusunan Renja tahun ini (Renja 2017) sudah berpedoman pada RPJMD 2014-2018 sebagai acuan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018, walau demikian masih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA tahun 2018.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, 18 Mei 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. H. SYAHRUDDIN HT.Ed.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19580201 198303 1 020